

“STRATEGI KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA MEMINIMALISIR PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL”

Rohani Sihombing

Email: anie.boru38@gmail.com

Universitas Muhammadiyah

Abstrak: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dalam meminimalisir hoaks telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Strategi komunikasi yang dilakukan meliputi keterlibatan stakeholder pemerintah dan bermitra dengan organisasi kemasyarakatan untuk mensosialisasikan bijak bermedia sosial. Tingginya penggunaan media digital saat ini berdampak pada penyebaran hoax yang banyak disebar berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya. Masyarakat melek literasi akan mengetahui cara memproduksi konten berita, namun juga lebih selektif, dalam hal ini dalam memahami informasi yang disampaikan melalui sosial media. Dengan literasi digital yang baik maka penyebaran hoaks bisa terminimalisasi. Penyebaran hoaks juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi dan efektivitas penegakan hukum, yang membuat pelaku hoaks sulit dilacak dan dihukum dengan sanksi yang kurang memberikan efek jera. Apalagi penyebarluasan hoaks menjadi semakin sulit dicegah karena minimnya literasi media di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu melalui strategi komunikasi yang dibangun pemerintah Kota Palangka Raya penyebaran hoaks di masyarakat bisa diminimalisir dan masyarakat menjadi agen perubahan dalam menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Strategi Komunika, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian.

Abstract: Research shows that local governments have implemented communication strategies to combat the spread of hoaks and hate speech. The strategy includes educational campaigns, public engagement, and media collaboration so that local government communication strategies have a positive impact on the spread of hoaks and hate speech. Frequent hoaxes via social media can shape public opinion that the news is true. Literacy communities would know how to produce news content, but also be more selective, in understanding information that is presented through social media. With good digital literacy feeding for the deployment of hoaks bias is terminimalization. Hoaks also contribute to a lack of regulatory clarity and the effectiveness of law enforcement, which makes the perpetrators difficult to track and punished with less harmful penalties. Moreover, the spread of hoaks is becoming increasingly difficult to prevent because of the lack of media literacy in Indonesian communities.

Keywords: Communication Strategy, Department of Communication, Informatics, Encryption.

PENDAHULUAN

Sarana media komunikasi saat ini telah berkembang sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi digital dan kita diberikan kepada banyak pilihan untuk dapat mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial. Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan masyarakat, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, pemuka agama, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga anak-anak dan remaja. Tidak bisa dipungkiri semakin canggihnya teknologi makan kita sebagai pengguna harus beradaptasi dengan hal itu.

Media sosial saat ini ibarat pisau bermata dua. Bisa memberikan dampak positif maupun dampak yang buruk. Sebagai pengguna media sosial yang bijak atau netizen yang baik alangkah baiknya untuk menggunakan media sosial dengan bijak dengan tidak memposting hal-hal yang merugikan orang lain bahkan diri sendiri seperti menyebarkan hoaks (berita bohong), ujaran kebencian (hate speech) maupun unggahan yang

meresahkan. Kita tahu bersama banyak oknum telah terjerat hokum akibat menyalahgunakan media sosial yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya literasi media sosial yang baik di masyarakat sehingga banyak oknum atau masyarakat terdampak akibat menyebarkan hoaks di media sosial.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya setiap tahunnya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Akan tetapi penyebaran hoaks dikalangan masyarakat masih tetap terjadi.

Penyebaran hoaks yang paling nyata terjadi pada saat pandemic Covid-19 mulai awal tahun 2020 pertengahan tahun 2022, penyebaran hoaks banyak dijumpai di wilayah Kota Palangka Raya hingga membuat masyarakat yang percaya dengan kabar hoaks yang beredar hingga menimbulkan kebingungan di tengah – tengah masyarakat. Pada Juni 2020, menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mengatakan sempat beredar berita tentang penggunaan sarung tangan petugas medis untuk rapid test dan swab test. Dalam narasi tersebut sarung tangan yang digunakan tim medis pada saat rapid test tidak diganti sementara warga yang melakukan test banyak diikuti warga. Akibat adanya kabar hoaks yang beredar, banyak masyarakat tidak mau mengikuti aturan pemerintah untuk melakukan rapid test sehingga pemerintah sulit menjalankan aturan yang dibuat pemerintah pusat.

Setelah ditelusuri ternyata berita yang telah beredar luas di masyarakat tidak benar atau bohong. Faktanya tidak begitu, Dinas Kesehatan pada saat itu telah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rapid test atau swab selalu dengan standar protokol kesehatan dan APD lengkap. Selain itu pada Mei 2023 beredar di media sosial Facebook berita hoaks terkait lowongan kerja di Sturbacks Kota Palangka Raya, hingga banyak masyarakat khususnya anak – anak muda lulusan terbaru (fresh graduate) melayangkan lamaran pekerjaan. Setelah ditelusuri ternyata berita tidak benar dan dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (<https://www.kominfo.go.id>).

Dari fakta diatas bahwa penyebaran berita hoaks saat ini yang semakin mudah tersebar di media sosial tidak dapat dipandang hal yang tidak serius. Faktanya peredaran hoaks di tengah – tengah masyarakat semakin mudah terjadi akibat mudahnya masyarakat mengakses media sosial. Hal itu dikarenakan literasi digital di masyarakat sangat rendah. Disinilah peran pemerintah untuk tetap mengedukasi masyarakat agar informasi yang diterima di media sosial tidak langsung diteria dan disebarkan, tetapi melakukan cek dan ricek terlebih dahulu.

Menurut laporan tersebut, indeks literasi digital Indonesia pada 2022 (berada di level 3,54 poin dari skala 1-5. Ini artinya, secara umum tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level "sedang". Untuk ukuran ASEAN tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut paling rendah jika dibandingkan negara di ASEAN lainnya yang rata-rata mencapai 70% (<https://indonesiabaik.id>). Pemerintah pusat melalui Kementerian komunikasi dan Informatika juga berupaya untuk meminimalisir Hoaks yang tersebar baik melalui literasi digital ke daerah – daerah bahkan telah membuat Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjerat pelaku penyebar hoaks.

Strategi komunikasi pemerintah daerah dalam memberantas hoaks di Kota Palangka Raya sangat penting dilakukan. Komunikasi yang baik mulai dari pimpinan sampai ke lapisan masyarakat akan membantu kesadaran masyarakat tentang berbahayanya informasi hoaks sehingga memunculkan dampak sosial dan memunculkan keresahan hingga membuat konflik di masyarakat. Disinilah peran Dinas Kominfo Kota Palangka Raya terus melakukan edukasi gerakan anti hoaks baik melalui sosialisasi maupun diseminasi media luar ruang. Gerakan anti hoaks ini telah berjalan mulai tahun 2019 hingga saat ini mulai dari tingkat kelurahan, organisasi kemasyarakatan, sekolah hingga kepada ASN (hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada 10 April 2024).

Untuk mendapatkan informasi yang akurat pemerintah Kota Palangka Raya memiliki platform resmi pemerintah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat akan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat mengenai risiko dan dampak dari adanya hoaks di masyarakat. Melalui platform yang dibangun pemerintah setiap informasi resmi dapat diterima oleh semua masyarakat. Akan tetapi sebagian oknum ada yang menyampaikan informasi tanpa yang tidak sebenarnya dengan membuat narasi seakan - akan benar dan dapat mempengaruhi bagi yang membacanya.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hoax diartikan sebagai berita yang bohong (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Chen dan Ishak menyatakan hoaks adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Fenomena hoaks mampu memengaruhi banyak orang sehingga orang yang terdampak akan dirugikan. Semakin tinggi penyebaran hoaks akan membuat masyarakat bingung dan menimbulkan konflik diantara masyarakat sehingga informasi fakta atau hoaks akan sulit dipilih masyarakat. Banyaknya berita bohong yang beredar saat ini menunjukkan bahwa peredaran berita palsu menyentuh hampir setiap aspek kehidupan bermasyarakat mulai dari kalangan bawah sampai atas. Mayoritas korban dari hoaks yang beredar adalah generasi milenial yang menggunakan akun media sosial hal ini dikarenakan kurang cerdasnya mengelola media sosial dengan bijak. Hasil survei Mastel menunjukkan bahwa media sosial dan aplikasi chatting merupakan dua saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoaks. Hasil survei tersebut juga mengungkap bahwa sebanyak 34,60 persen responden menerima hoaks setiap hari (Mastel, 2019). Hoaks adalah salah satu pekerjaan pemerintah pada era revolusi industri yang mengacu pada penggunaan teknologi internet. sehingga informasi dapat menyebar langsung dengan cepat tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu (Prayitno, 2018). Dalam pemerintahan hoaks yang beredar akan mampu memutarbalikkan fakta sehingga informasi yang diberikan pemerintah ke masyarakat salah diartikan hingga program pembangunan bisa lambat dan berujung pada timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri.

Sama seperti yang dijelaskan diatas bahwa hoax paling banyak menyebar melalui media sosial. Padahal media sosial yang kita gunakan saat ini jauh lebih banyak manfaatnya jika digunakan dengan bijak. Selain digunakan sebagai wadah hubungan sosial antar sesama pengguna, juga sebagai media marketing atau untuk bisnis online maupun untuk menambah ilmu pengetahuan. Disinilah kecakapan kita sebagai pengguna media sosial bisa telaah untuk menggunakannya. Media sosial sebagai penghubung komunikasi jarak jauh dan memberikan informasi yang akurat dengan cepat maka dengan literasi yang baik pengguna media sosial bisa mendapatkan manfaat dari media sosial tersebut.

Penyebarluasan konten negatif seperti hoax di media sosial semakin masif karena masyarakat di era post-truth lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras, dibandingkan fakta. Merujuk pada survei Mastel, diperoleh data bahwa media sosial merupakan sumber utama penyebaran hoax dengan 92,4%, dengan konten SARA dan politik menjadi dua konten yang mendominasi selama pemilihan umum (Jurnal Lemhanas RI). Hal ini patut diwaspadai pemerintah khususnya di wilayah pemerintahan Kota Palangka Raya bagaimana memerangi penyebaran hoaks ini bisa diminimalisir. Semakin banyaknya hoaks akan memengaruhi kehidupan bermasyarakat, tatanan sosial bahkan keutuhan bangsa bisa terpecah. ujaran kebencian tetap mewabah dalam masyarakat, karena tetap ada sejumlah masyarakat yang secara signifikan tetap mengonsumsinya.

Disaat masyarakat masih kurang teredukasi menggunakan media sosial untuk memerangi hoax, maka masyarakat dapat terprovokasi dan terjebak dalam suasana saling curiga, kegaduhan di masyarakat akan terjasi akan berpotensi konflik sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi inilah yang dapat berdampak terhadap harmoni sosial dalam kehidupan kebangsaan yang sangat beragam. Terlebih keberagaman budaya dan agama

dan ras di Indonesia yang plural, dan masyarakat percaya dengan informasi hoaks akan menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat dan berimbas pada program pembangunan dan tujuan nasional lambat.

Seiring perkembangan zaman, literasi tidak sebatas diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, namun ada beberapa jenis literasi lain yang diperlukan bagi kehidupan seseorang. Kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan penggunaan media sosial (netizen) diasumsikan oleh penggunanya akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial. (Jurnal UGM, pada 20 April 2024) Berdasarkan data dari UNESCO, ada enam kategori literasi yang diperlukan dalam abad 21, yaitu (a) basic literacy, (b) computer literacy, (c) media literacy, (d) distance learning / e-learning, (e) cultural literacy, dan (f) information literacy (Jurnal Moestopo).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya dalam menangkal hoaks. Termasuk pula pendekatan strategi komunikasi apa yang diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penyebaran hoaks di wilayah pemerintahan Kota Palangka Raya dan bagaimana pemerintah meminimalisir penyebaran hoaks di masyarakat melalui media sosial.

Komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya melawan hoaks ditandai dengan penyelenggaraan Deklarasi Anti Hoaks pada 19 Maret 2018. Bersama dengan mahasiswa, jajaran Polresta Kota Palangka Raya, elemen masyarakat dan pemerintah Kota Palangka Raya turut hadir dalam deklarasi yang dilaksanakan di halaman Kantor Walikota. Deklarasi itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan pada kain putih oleh sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, hingga aparatur pemerintah. Melalui deklarasi, wilayah Kota Palangka Raya tetap aman, tentram dan damai dan tidak terprovokasi dengan hoaks yang beredar (borneonews.com).

METODE PENELITIAN

Dalam menuliskan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan cara menyampaikan informasi dengan mendeskripsikan permasalahan dan mendeskripsikan permasalahan. Pendekatan penelitian kualitatif lebih kepada pendekatan tidak pada data statistik tetapi berdasarkan bukti – bukti yang ada di lapangan.

Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari penelitian yang diamati, dalam hal ini peneliti menafsirkan data yang diteliti dari observasi, dokumentasi sehingga mendapat jawaban dari permasalahan dengan rinci dan jelas. Untuk memperoleh data yang lengkap, strategi pengumpulan data metode kualitatif deskriptif pada umumnya melibatkan wawancara individu atau kelompok menggunakan wawancara atau tanya jawab di lokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Selanjutnya, penulis melakukan metode wawancara atau interview kepada para informan dengan mengacu pada pertanyaan yang terkait dengan strategi komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya meminimalisir penyebaran hoaks di media social.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dan mendokumentasikannya. Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari beberapa informan yang turut serta berkontribusi pada penelitian ini adalah Pranata Humas Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya) dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan dengan cara coding data berdasarkan kategori penelitian yang dicari. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis

secara deskriptif dengan mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan menurut pengelompokan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan (Raharjo, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran informasi hoaks yang terus terjadi di masyarakat tidak serta merta kegagalan pemerintah mengatasinya memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palangka Raya terus berulang kali memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu bijak menggunakan media sosial. Sesuai dengan visi misi Walikota Palangka Raya dibawah kepemimpinan Fairid Naparin dan Umi Mastikah tahun 2019-2023 yaitu Smart City (Kota Cerdas) dengan tiga konsep Smart Environment (Lingkungan Cerdas), Smart Society (Masyarakat Cerdas) dan Smart Economy (Ekonomi Cerdas), (<https://palangkaraya.go.id/>). Salah satu perwujudan dari Smart City ini dengan memiliki kecakapan sumber daya manusia yang mumpuni. Keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat adalah hal wajib dilakukan untuk mendukung program pimpinan daerah.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah melakukan sosialisasi literasi digital dalam hal ini sosialisasi penanggulangan hoaks ke sekolah SMP, SMU dan kepada komunitas oraganisasi kemasyarakat. Selain itu, Diskominfo Kota Palangka Raya juga berkerjsama dengan Tim Virtual Police Bidhumas Polda Kalteng untuk memberikan edukasi tentang bahaya hoaks, (<https://www.borneonews.co.id>).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan Diskominfo Kota Palangka Raya dalam menanggulangi penyebaran hoaks di wilayah pemerintahan Kota Palangka Raya telah berjalan baik dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Publik yang membidangi informasi hoaks. Kepala Dinas Kominfo Kota Palangka Raya juga berkomitmen meminimalisir penyebaran hoaks dengan memberikan literasi bijak mermedia sosial kepada masyarakat.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Diskominfo Kota Palangka Raya sebagai tugas pokok dan fungsinya terus mengawal upaya untuk meningkatkan literasi digital sehingga masyarakat semakin teredukasi dan dapat memilah berita yang harus dipercaya untuk disebar. Dengan menyediakan fakta yang jelas dan benar, pemerintah daerah dapat mengurangi penyebaran hoaks maupun berita bohong untuk mngetasi konflik sosial di masyarakat.dalam mengatasi penyebaran hoaks pemrintah Kota Palangka Raya harus menekankan pentingnya kesatuan, kerukunan dan peratuan masyarakat di atas perbedaan dan pertikaian.

Table I. Pernyataan JFT Pranata Humas Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya.

No	Informan	Pernyataan Penting
1	PATAR LIMBONG, S.T (JFT Pranata Humas Sub Koordinator Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik)	".....Tentunya kami sebagai pemerintah terus meningkatkan literasi digital warga, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan maupun kecakapan warga sebagai pengguna yang memanfaatkan berbagai media digital...."

Menurut penulis, pola yang dilaksanakan Kominfo Kota palangka raya dalam memberantas hoaks di masyarakat telah maksimal dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu juga Pemerintah juga melibatkan wartawan maupun pegiat media sosial untuk bersama- sama menyebarkan informasi yang jelas dan faktual.

Sosialisasi

Sosialisasi menangkal hoaks di media sosial maupun di media elektronik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakannya bijak. Masyarakat sebagai pengguna media sosial harus turut berperan menghentikan informasi hoaks. Sosialisasi yang dilakukan Diskominfo Kota Palangka Raya ke berbagai sekolah maupun

kepada masyarakat umum supaya masyarakat mengetahui apa dampak yang terjadi dari hoaks yang berkembang. Karena saat ini pelaku penyebar hoaks bias terjerat hukum Undang Undang Elektronik (UU ITE). Sosialisasi yang dilakukan Diskominfo Kota Palangka Raya dilaksanakan langsung ke sekolah – sekolah juga dengan turn langsung ke sekolah – sekolah serta melaksanakan sosialisasi dengan menyebarkan spanduk maupun leaflet berisikan anti hoaks, (<https://potretkalteng.com/diakses>).

Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik (<https://www.hukumonline.com/>). Dengan adanya UU ITE ini pemerintah secara signifikan untuk meminimalisir penyebaran informasi palsu sehingga masyarakat tidak sampai terjerat hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, upaya Diskominfo Kota Palangkaraya memberantas Hoaks dilakukan dengan berbagai cara bekerja Sama Dengan Bidhumas Polda Kalteng Untuk mengedukasi masyarakat terkait penanggulangan hoaks.

Kerjasama yang dilakukan Diskominfo Kota Palangka Raya sejak tahun 2019 untuk memberantas hoaks dengan metode sosialisasi ke lapangan juga melalui webinar. Terlebih saat pandemic Covid-19 tahun 2020 hingga tahun 2022 dilaksanakan secara daring. Berbagai kalangan masyarakat diundang untuk mengikuti webinar zoom karena pada saat itu karena pandemic Covid-19 banyak bermunculan informasi hoaks yang menyesatkan terkait Covid-19, (<https://mediacenter.palangkaraya.go.id>).

Adanya jalinan kerjasama yang dilaksanakan dengan Bidhumas Polda Kalteng sebagai langkah antisipasi supaya masyarakat tidak terjerat hukum karena telah menyebarkan berita hoaks. Selain itu untuk menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan bermasyarakat melalui informasi yang berkualitas.

Dengan adanya UU ITE ini, sosialisasi yang melibatkan pihak Polda Kalteng akan berdampak baik bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk menggunakan dan menyebarkan informasi yang jelas dan tidak merugikan pihak manapun. Sesuai dengan UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan ayt (2) yang berbunyi :

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
- 3) Kemudian, orang yang melanggar Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 berpotensi dipidana berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, hukum pidana yang berkaitan tentang berita bohong (hoaks) juga dimuat dalam Kitab Undang -0 Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 317 dan Pasal 318, yang berbunyi:

Pasal 317 KUHP:

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318 KUHP:

1. menyatakan bahwa: 1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak – hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Peneliti meyakini upaya memerangi penyebaran berita palsu di internet tidak cukup hanya dengan melakukan pemblokiran media sosial, adanya sanksi tegas menurut peneliti bisa membuar efek jera bagi masyarakat.

Table 2. Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota PalangkaRaya terhadap UU ITE

No	Informan	Pernyataan Penting
1	SAIPULLAH, S.H (Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya)	“.....Untuk pemblokiran akun fake atau akun media sosial yang menyebar informasi hoaks bukan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki wewenang tersebut....”

Banyaknya aplikasi ilegal dan tiada ijin resmi dari pemerintah membuat banyak situs – situs yang menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya ditambah lagi dengan akun fake atau anonim. Dengan kemajuan teknologi internet dan kemudahan dalam membuat aplikasi atau media sosial, pemblokiran situs menjadi tidak efektif dalam menangkal penyebaran berita palsu. Disinilah pemerintah untuk memberantas penyebaran hoaks secara konsisten untuk membangun literasi digital yang baik di masyarakat. Sosialisasi juga dilaksanakan bawa penyebar hoaks juga bisa dipidana dengan UU ITE yang telah disahkan pemerintah.



Diskominfo Kota Palangka Raya Ajak Pelajar Perangi Hoax

6 Maret 2024 / 0 Comments / in Berita SKPD, Media Center

MEDIA CENTER, Palangka Raya – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi Generasi Anti-Hoax di SMP Negeri 3 Kota Palangka Raya, Selasa (5/3/2024).

Gambar 1. Sosialisasi Anti Hoaks Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dengan narasumber ari Bidhimas Polda Kalteng, 6 Maret 2024. (<https://infopublik.id/diakses>)

Tabel 3. Pernyataan Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya terhadap strategi Komunikasi Pemerintah

No	Informan	Pernyataan Penting
1	HENDRA SURYA, ST.,M.Eng (Pernyataan Kepala Bidang PEngelola Informasi Publik)	".....Sosialisasi yang kita laksanakan di sekolah atau di komunitas masyarakat kita melibatkan narasumber misalnya dari Polda Kalteng untuk menjelaskan bahwa penyebar hoaks bisa dipidana dengan UU ITE...."

Literasi Media

Literasi media baik konvensional maupun literasi internet mengajak sebagai pengguna maupun sebagai komunikator untuk memiliki kemampuan membaca ketika dihadapkan dengan media. Teknologi media, khususnya media baru mampu mengubah cara orang belajar, bermain dan bermasyarakat di dunia nyata. Melek media atau lebih dikenal literasi media merupakan satu diantara sekian banyak istilah yang sering dikemukakan dalam beragam kesempatan, baik dalam pembicaraan yang tidak formal hingga diskusi-diskusi akademis. Istilah tersebut diartikan cukup bervariasi.

Literasi Media atau kemelekan media (melek media) adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses, (<https://id.wikipedia.org>).

Rendahnya literasi akan memengaruhi seseorang untuk menggunakan media sosial yang dimilikinya. Data statistik tahun 2023 mencatat jumlah penduduk bangsa Indonesia 278,69 juta jiwa hanya 0,001 persen atau 1 dari 1.000 orang yang melek literasi (<https://www.kompas.com/>). Dari data tersebut jelas sekali bawa penyebaran hoaks mudah terjadi karena literasi yang rendah. Untuk mengatasi hal demikian perlu tindakan komprehensif dengan menggalakkan melek literasi mulai dari sekolah dasar di semua wilayah. Salah satu upaya meningkatkan literasi media yang dilakukan Dinas Kominfo Kota Palangka Raya kepada masyarakat adalah dengan giat melaksanakan sosialisasi baik di ruang media sosial dengan menampilkan konten-konten anti hoaks. Selain itu Dinas Kominfo juga telah menyebar spanduk diseminasi literasi bijak bermedia sosial kepada masyarakat melalui baliho atau spanduk yang ditempatkan di ruang terbuka.

Tabel 4. Pernyataan Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya terhadap Literasi Media

No	Informan	Pernyataan Penting
1	HENDRA SURYA, ST.,M.Eng (Pernyataan Kepala Bidang PEngelola Informasi Publik)	".....Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kominfo setiap tahunnya gencar melakukan sosialisasi ke sekolah. Target kita bias melaksanakan sekolah SMP dan SMA di seluruh Kota Palangka Raya mensosialisasikan melek literasi digital"

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya juga memanfaatkan media konvensional, seperti leaflet dan stiker yang dibagikan kepada publik ketika menyelenggarakan sosialisasi anti hoaks. Leaflet dan stiker tersebut memuat imbauan untuk tidak sembarangan berbagi informasi yang belum diketahui kebenarannya secara pasti. Pesan utama yang jelas dan desain media yang dirancang secara menarik diharapkan mampu membangkitkan perhatian publik, sasaran dan meningkatkan efektivitas program anti hoaks.

Humas pemerintah pun harus mengerti karakteristik dari masing-masing media, sehingga pesan anti hoaks dapat menjangkau publik melalui media yang tepat. Selain masyarakat, Dinas Kominfo Palangka Raya juga melakukan sosialisasi kepada ASN dan PTT

di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk bermedia sosial yang bijak kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan program pemerintah pusat dan daerah untuk mengedukasi masyarakat untuk melek media dan menggunakan media digital untuk menciptakan pengguna media sosial melek digital.



Gambar 2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya menyebarkan spanduk anti hoaks ke Kelurahan di Kota palangka Raya.

Monitoring Media Online dan Media Massa

Dalam melakukan media monitoring, Dinas Kominfo Kota Palangka Raya dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, sehingga pantauan media masih dilakukan secara manual oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik terhadap akun media sosial lokal setiap harinya. Karena masih dilakukan dengan metode konvensional, akibatnya media monitoring ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Hasil media monitoring selanjutnya disampaikan kepada pimpinan. Apabila hasil media monitoring menunjukkan adanya indikasi hoaks, maka hasil tersebut akan diteruskan pula kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan pula bahwa aktivitas media monitoring didukung dengan kompetensi humas pemerintah dalam memverifikasi apakah suatu informasi termasuk kategori informasi yang valid—atau sebaliknya termasuk kategori hoaks. Selain itu monitoring media sosial dan media massa juga untuk melihat respon masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan keterlibatan masyarakat turut membantu pemerintah dalam pemanfaatan di media sosial dan media massa.

Untuk monitoring media massa juga dilakukan secara manual dari berbagai media massa yang beredar di wilayah Kota Palangka Raya, jika ditemukan adanya berita hoaks di media massa akan dilakukan teguran langsung untuk media massa tersebut. Meski dihadapkan pada kendala tersebut, namun Dinas Kominfo Kota Palangka Raya telah berupaya menjalin kerjasama dengan Humas Polda Kalimantan Tengah yang memiliki dukungan sistem informasi untuk mengidentifikasi hoaks maupun informasi yang bersifat provokatif. Informasi tentang potensi hoaks yang disampaikan oleh Kominfo Kota Palangka Raya kemudian ditindaklanjuti oleh Tim BidHumas Polda Kalimantan Tengah. Selain itu, sinergi dengan komunitas pegiat media sosial juga dijalin oleh Dinas Kominfo Kota Palangka Raya untuk membantu mengatasi permasalahan hoaks seperti KIM (Komunitas Informasi Masyarakat).

Tabel 5. Pernyataan Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya terkait peran

No	Informan	Pernyataan Penting
1	HENDRA SURYA, ST,.M.Eng (Pernyataan Kepala Bidang PEngelola Informasi Publik)	“.....KIM telah kita bentuk di setiap Kelurahan di Kota Palangka Raya sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat termasuk anggota KIM ini mengedukasi masyarakat untuk memerangi hoaks di wilayah masing - masing”

KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang dibentuk Dinas Kominfo Kota Palangka Raya pada tahun 2018 dibentuk salahsatu fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Palangka Raya memberikan informasi kepada masyarakat dan program serta capaian pemerintah dalam pembangunan. Melalui Kelompok Informasi Masyarakat, diharapkan upaya identifikasi hoaks dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga apabila dijumpai adanya hoaks, maka tindak lanjut terhadap berita bohong tersebut dapat segera dilakukan, (<https://infopublik.id/diakses>).

Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Palangka Raya pada tahap mendefinisikan permasalahan ini selaras dengan hasil penelitian Rosita, (2018) bahwa Dinas Kominfo Kota Palangka Raya pun mengerahkan tim media untuk memonitor dan menganalisis perkembangan berita di berbagai media secara rutin sebagai dasar perumusan kebijakan selanjutnya. Begitu pula, penelitian (Saidah dan Rusfian, 2020) juga menunjukkan bahwa tim Humas melakukan media monitoring sebagai upaya manajemen isu. Media monitoring yang dilakukan oleh Tim Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya dan para humas pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai langkah proaktif humas dalam menganalisis isu dari lingkungan eksternal. Selain itu, langkah kerjasama dengan stakeholder eksternal yang dijalin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya sejalan dengan hasil penelitian Rosita (2018), Saidah dan Rusfian (2020), dimana upaya penyebaran informasi akan semakin efektif apabila didukung peran aktif para pemangku kepentingan lainnya

KESIMPULAN

Merujuk pada berbagai temuan peneliti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya sebagai humas pemerintah daerah belum memaksimalkan strategi komunikasi untuk menangkal hoaks. Hal ini didasarkan fakta bahwa langkah-langkah perencanaan strategis belum dilakukan secara sistematis dan terukur. Analisis situasi hanya didukung dengan aktivitas media monitoring secara rutin dan dilakukan dengan manual, namun belum diperkuat dengan riset tentang opini atau sikap publik terhadap hoaks. Meski dengan keterbasan SDM dan teknologi, namun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung strategi komunikasi dalam menangkal hoaks. Sejumlah kendala yang dihadapi seperti aplikasi monitoring opini dan hoaks belum dimiliki, infratraktur yang memadai dan kerjasama dengan stakeholder pihak kepolisian maupun BIN daerah belum kuat untuk menjaring penyebaran hoaks di wilayah pemerintahan Kota Palangka Raya.

Sejumlah upaya tersebut meliputi, menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait dan mengoptimalkan sosialisasi anti hoaks di berbagai kanal media resmi yang dimiliki pemerintah. Ditinjau dari pendekatan strategi komunikasi yang digunakan, Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan strategi komunikasi proaktif dan reaktif dalam menangkal hoaks. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai input bagi humas pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya untuk merencanakan program-program selanjutnya secara cermat melalui penetapan strategi

komunikasi yang tepat, sehingga implementasi program dapat berlangsung secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian berikutnya dapat mengkaji sisi efektivitas strategi komunikasi yang diimplementasikan untuk mendukung keberhasilan suatu program atau kegiatan.

Menurut Peneliti ada empat pendekatan yang penting untuk dilaksanakan pemerintah Kota Palangka Raya dalam menangani hoaks yakni pendekatan persuasif dengan mengajak masyarakat bersama – sama memerangi hoaks, pendekatan secara kelembagaan dengan terus menggalakkan komunitas atau organisasi di masyarakat untuk membantu pemerintah sebagai anti hoaks. Selanjutnya adalah pendekatan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi untuk mendeteksi penyebaran hoaks di media sosial, dan pendekatan literasi, dengan turun tangan langsung ke masyarakat melakukan sosialisasi mulai dari sekolah, hingga masyarakat umum serta literasi digital dengan mengkampanyekan gerakan anti hoaks di media social.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Ishak A, Email Hoax Detection System Using Levenshtein Distance Method, *Journal of computers*, vol. 9, no. 2, academy publisher, 2014, 45.
- Hasil Survey Mastel tentang Wabah Hoax Nasional.”, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf (diakses 26 Maret 2019 pukul 23:28)
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142-164.
- Kathleen Tyneer, *Literacy in a Digital World: Teaching and Learning in the Age of Information* (New York: Routledge, 2009), hal.118-119
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., . . . Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science* (New York, N.Y.), 359(6380), 1094. doi:10.1126/science.aao2998
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.11
- Kombes Pol Chaerul Yani, S.IK, M.H., (2019). Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial. *Jurnal Kajian Lemhanas*, Edisi 40. <https://jurnal.lemhannas.go.id>
- Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri, (2020). Mengenal dan Mengantisipasi Hoax di Media Sosial pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 03, No. 01. <https://journal.moestopo.ac.id/>
- Rahardjo, M.(2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*.
- Rosita, D. N. I. P. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Literasi Media di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Bali. *Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.1778> Saidah
- Saidah, M., & Rusfian, E. Z. (2020). Hoax management of presidential staff office: An example of government public relations strategies. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(1), 32. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.1769> Suprawoto
- Vibriza Juliswara, (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/28586>
- [https://www.borneonews.co.id/berita/173044-kominfo-palangka-raya-temukan-puluhan-hoaks-terkait covid-19-sejak-april-hingga-juni/](https://www.borneonews.co.id/berita/173044-kominfo-palangka-raya-temukan-puluhan-hoaks-terkait-covid-19-sejak-april-hingga-juni/)
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/49018/hoaks-lowongan-kerja-di-starbucks-palangka-raya/0/laporan_isu_hoaks/
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/literasi-digital-indonesia-naik-pada-2022-tapi-budaya-digital-turun/>
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoaks/>
- <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17916-pengertian-literasi-media>
- [65](https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/08/175738871/5-faktor-penyebab-literasi-di-</p></div><div data-bbox=)

indonesia-rendah-dan-upaya-meningkatkannya?page=all/
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/255655/palangka-raja-deklarasi-anti-hoaks/>
<https://www.borneonews.co.id/berita/89121-polres-palangka-raja-prakarsai-deklarasi-masyarakat-anti-hoax/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama/
<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/menuju-smart-city/>
<https://tourism.binus.ac.id/2021/12/28/apa-itu-coding-dalam-pengolahan-data-kualitatif/>
<http://repository.uin-malang.ac.id/1104/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>
<https://www.borneonews.co.id/berita/310383-polda-kalteng-gencar-edukasi-pelajar-agar-bijak-bermedia-sosial>
<https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/>
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/832739/diskominfo-kota-palangka-raja-ajak-pelajar-perangi-hoaks>
<https://potretkalteng.com/gandeng-humas-polda-kalteng-kominfo-kota-palangka-raja-sosialisasikan-stop-hoax-ke-pelajar/>
<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/dinas-kominfo-kota-palangka-raja-gelar-webinar-anti-hoaks-bagi-pelajar/>
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/9477/categories-style-02.html/>
<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/11456-pasal-28-ayat-1-undangundang-nomor-19-tahun-2016-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite-melarang/>
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-\(2\)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-(2)-uu-ite-2024-yang-menjerat-penyebar-kebencian-sara-lt65a6950b71ccc/)